



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION

Jalan Pramuka Nomor 33 Lt 1. Jakarta 13120
Telepon 021-85910031



Nomor : S- 414/D2/STAR/2013
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Penawaran Program Beasiswa S2 STAR *Intake*
2014

20 Desember 2013

Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian dan
2. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi

(Lampiran 1)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (institusi sektor publik) melalui peningkatan kapasitas SDM Pengelola Keuangan Negara dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (PKN-APIP), BPKP selaku *Executing Agency* STAR akan melaksanakan seleksi Program Beasiswa S2 STAR *Intake* 2014. Untuk itu, mohon informasi beasiswa STAR ini dapat diedarkan kepada pejabat/staf Pengelola Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda Saudara, dan selanjutnya memfasilitasi pendaftaran para pejabat/staf untuk mengikuti program tersebut.

Untuk kebutuhan penyebaran informasi dan pendaftaran, bersama ini kami lampirkan:

1. Uraian ringkas Program Beasiswa dan Universitas Penyelenggara Program S2 STAR *intake* 2014 (Lampiran 2);
2. Formulir yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan fasilitasi pendaftaran yaitu:
 - a. Form STAR-D1 untuk digunakan calon mahasiswa dalam pendaftaran (Lampiran 3-1);
 - b. Form STAR-D2 untuk kebutuhan pengujian kelengkapan pencalonan mahasiswa oleh Badan Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota (Lampiran 3-2);
 - c. Form STAR-D3 untuk kebutuhan pengujian persyaratan administrasi calon mahasiswa (Lampiran 3-3);
 - d. Form STAR-D4 untuk kebutuhan rekapitulasi mahasiswa yang memenuhi syarat (Lampiran 3-4);

Verifikasi terhadap dokumen fisik pelamar sesuai dengan kriteria seleksi administrasi yang tercantum di dalam panduan, merupakan wewenang dan tanggung jawab instansi Saudara.

Kepada peserta yang lolos verifikasi administratif agar ditugaskan mendaftar dan mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi penyelenggara yang dituju. Daftar peserta yang lolos verifikasi administratif agar disampaikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara dan ditembuskan ke Satgas STAR Perwakilan BPKP. Sedangkan dokumen fisik peserta yang lolos verifikasi administratif harap diserahkan melalui Satgas STAR Perwakilan BPKP paling lambat saat tanggal wawancara.

Informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran, dapat menghubungi Saudara Rina Ramayani di nomor telepon 021-85910031 ext. 0424.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam
selaku

Ketua Pengarah Harian STAR BPKP



Binsar H. Simanjuntak

NIP 19570728 197811 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP selaku Ketua Pengarah STAR BPKP (sebagai laporan);
2. Para Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Utama BPKP selaku Tim Pengarah STAR BPKP;
3. Para Kepala Perwakilan BPKP;
4. Pengelola Program STAR di Perguruan Tinggi Penyelenggara;
5. Kepala Biro SDM Kementerian/Lembaga;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota.



Lampiran 1

Surat Nomor : S-44/D2/STAR/2013

Tanggal : 20 Desember 2013

Yth .:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretariat Negara
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan Rakyat
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olah Raga
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
35. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
36. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
37. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
38. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
39. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
40. Sekretaris Utama Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
41. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
42. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
43. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

44. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Tenaga Nuklir
45. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
46. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan
47. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
48. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
49. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
50. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
51. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
52. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
53. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
54. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
55. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sumatera Utara
56. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam
57. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sumatra Utara
58. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Riau
59. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau
60. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sumatra Barat
61. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Jambi
62. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sumatra Selatan
63. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Bengkulu
64. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung
65. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Lampung
66. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah DKI Jakarta
67. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Banten
68. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Jawa Barat
69. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
70. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah D.I. Yogyakarta
71. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Jawa Timur
72. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Bali
73. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Barat
74. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Timur
75. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kalimantan Barat
76. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kalimantan Tengah
77. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kalimantan Selatan
78. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kalimantan Timur
79. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Kalimantan Utara
80. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sulawesi Selatan
81. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sulawesi Barat
82. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sulawesi Tenggara
83. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sulawesi Tengah
84. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Gorontalo
85. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Sulawesi Utara
86. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Maluku
87. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Maluku Utara
88. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Papua
89. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Papua Barat

INFORMASI PROGRAM

STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) PROJECT

I. PENDAHULUAN

Program *STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR)* ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang diberi nama *State Audit Reform-Sector Development Program (STAR-SDP)*. Program yang diinisiasi Pemerintah Republik Indonesia ini berkonsentrasi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi staf pengelola keuangan negara dan internal auditor pemerintahan.

Dalam program STAR-SDP BPKP berperan sebagai *Project Implementation Unit (PIU)*, Namun dalam STAR ini BPKP menjalankan peran sebagai *Executing Agency*. Peran ini sejalan dengan misi BPKP dalam peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah yang pada akhirnya mendukung amanah yang diemban BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP

II. TUJUAN

Tujuan utama program STAR adalah menguatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (institusi sektor publik) melalui peningkatan kapasitas SDM Pengelola Keuangan Negara-Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (PKN-APIP) yang menjalankan fungsi dalam bidang penganggaran, pelaporan keuangan, internal audit maupun manajemen aset.

III. RUANG LINGKUP

Program beasiswa STAR mencakup beasiswa setingkat S1 dan S2 dalam negeri.

IV. BIDANG STUDI

Bidang studi yang dapat diikuti oleh peserta adalah Akuntansi Pemerintahan atau Pengawasan Keuangan Negara.

V. KRITERIA PENERIMA DAN PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA

A Kriteria Penerima Program Beasiswa

Kriteria penerima program beasiswa S1/D-IV dan S2 adalah sebagai berikut:

1. Program Beasiswa S1/D-IV

- a. Diajukan/dicalonkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda;
- b. PNS yang bekerja sebagai PKN-APIP pada instansinya;

- c. Pada saat pendaftaran telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), minimal 1 tahun;
 - d. Pada saat pendaftaran (ditetapkan setiap periode) umur maksimal 37 tahun;
 - e. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c);
 - f. Memiliki ijazah D3 dan atau setara D3 jurusan Akuntansi, Bisnis, Ekonomi Perusahaan, Manajemen Keuangan/ Perpajakan yang telah diakui secara kedinasan;
 - g. Bersedia bekerja kembali minimal 2 tahun sebagai PKN-APIP di instansinya dengan menandatangani surat pernyataan;
 - h. Lulus seleksi administrasi dan akademis oleh Perguruan Tinggi;
 - i. Ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta penerima program beasiswa oleh BPKP;
 - j. Surat persetujuan Atasan Langsung untuk mengikuti tugas belajar.
2. Program Beasiswa S2
- a. Diajukan/dicalonkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda;
 - b. PNS yang bekerja sebagai PKN-APIP pada instansinya;
 - c. Pada saat pendaftaran telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), minimal 1 tahun;
 - d. Pada saat pendaftaran (ditetapkan setiap periode) umur maksimal 42 tahun;
 - e. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - f. Memiliki ijazah Sarjana (S1) atau setara S1 yang telah diakui secara kedinasan, diutamakan yang berlatar belakang ekonomi/akuntansi.
 - g. Bersedia bekerja kembali minimal 2 tahun sebagai PKN-APIP di instansinya dengan menandatangani surat pernyataan;
 - h. Lulus seleksi administrasi dan akademis oleh Perguruan Tinggi;
 - i. Ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta penerima program beasiswa oleh BPKP;
 - j. Surat persetujuan Atasan Langsung untuk mengikuti tugas belajar.

VI. TAHAPAN SELEKSI

Mekanisme untuk menyeleksi peserta program Beasiswa S1/D-IV dan S2 adalah sebagai berikut.

1. Calon peserta mengajukan lamaran untuk mengikuti program pada pengelola kepegawaian di K/L/Pemda dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dilengkapi dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan;
2. Unit pengelola kepegawaian pada K/L/Pemda melakukan seleksi administrasi sesuai dengan kriteria penerima program beasiswa;
3. Unit pengelola kepegawaian pada K/L/Pemda mengajukan calon peserta yang memenuhi syarat administrasi kepada Perguruan Tinggi dengan tembusan ke BPKP;

4. Perguruan Tinggi melakukan seleksi administrasi dan akademis;
5. Perguruan Tinggi menyerahkan hasil seleksi kepada BPKP dan mengajukan calon peserta yang lulus seleksi (daftar peserta yang mengikuti seleksi beserta nilai hasil seleksi);
6. Khusus untuk program beasiswa S2, BPKP dan Perguruan Tinggi melakukan seleksi terakhir dalam bentuk wawancara;
7. BPKP menetapkan peserta yang lulus seleksi untuk mengikuti program beasiswa.

VII. UNIVERSITAS

Daftar Universitas yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara Program Beasiswa S2 STAR adalah sebagai berikut:

NO	UNIVERSITAS	AKREDITASI
1	Universitas Airlangga	Akreditasi B
2	Universitas Andalas	Akreditasi B
3	Universitas Brawijaya Malang	Akreditasi A
4	Universitas Diponegoro Semarang	Akreditasi A
5	Universitas Gadjah Mada	Akreditasi A
6	Universitas Hasanuddin Makassar	Akreditasi B
7	Universitas Indonesia -Maksi	Akreditasi A
8	Universitas Indonesia -PPIA	Akreditasi A
9	Universitas Mataram	Akreditasi B
10	Universitas Padjadjaran	Akreditasi B
11	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Akreditasi B
12	Universitas Sumatera Utara Medan	Akreditasi B
13	Universitas Syiah Kuala	Akreditasi B
14	Universitas Udayana	Akreditasi B
15	Universitas Jenderal Soedirman	Akreditasi B

VIII. JADWAL KEGIATAN TAHUN 2014

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pendaftaran Calon Peserta ke Unit Pengelola Kepegawaian Kementerian/ Lembaga/Pemda	Tentatif (sebelum periode pendaftaran di PT Penyelenggara berakhir)
2	Seleksi Administrasi Calon Peserta oleh Unit Pengelola Kepegawaian Kementerian/ Lembaga/Pemda.	
3	Pendaftaran peserta yang memenuhi syarat administrasi ke PT Penyelenggara	Sesuai Kalender Akademik masing-masing PT Penyelenggara
4	Test Akademik oleh PT Penyelenggara	

NO	KEGIATAN	TANGGAL
5	Test Wawancara oleh STAR/PT Penyelenggara	Tentatif (sebelum periode perkuliahan di PT Penyelenggara dimulai)
6	Pengumuman /Penetapan Peserta Program	
7	Registrasi Ulang dan Mulai perkuliahan	Sesuai Kalender Akademik PT Penyelenggara

IX. PENYALURAN DANA PROGRAM BEASISWA

Penyaluran dana biaya pendidikan dapat langsung dikelola oleh Tim Pengelola yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa, sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya. Sedangkan dana biaya hidup bagi mahasiswa wajib didistribusikan segera oleh tim pengelola melalui cara pembayaran tunai langsung ke mahasiswa atau ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa.

X. JADWAL PENCAIRAN DANA PROGRAM BEASISWA

Penyaluran dana beasiswa didasarkan pada tahap pembayaran yang ada di kontrak. Secara rinci tahapan pembayaran dana program beasiswa STAR ini dituangkan dalam kontrak.

Penyaluran atau pembayaran dana program beasiswa dari BPKP ke Perguruan Tinggi Penyelenggara, sangat tergantung dari kedisiplinan dan komitmen Tim Pengelola dalam mengirimkan laporannya sesuai ketentuan yang berlaku. Keterlambatan dari pengiriman laporan akan berimplikasi pada keterlambatan pencairan dana tahap berikutnya di BPKP.

Untuk lebih jelasnya dapat membuka website www.bpkp.go.id dengan menu STAR PROJECT.